



Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Jogja terhadap Perubahan APBD TA 2021

Oktober, Vaksinasi 100 Persen Warga Kota Jogja Harus Tuntas



PERSEKUTUAN BERSAMA: Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Dhan Novitasari meneken berita acara disaksikan Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Wakil Kota Haryadi Suyuti, Ketua Dewan Danang Rudyatmoko dan Wakil Ketua Dewan M. Furzan.

DPRD Kota Jogja memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 Kota Jogja. Antara lain APBD TA 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja Tahun 2017-2022.

"SUDAH seharusnya ruang fiskal benar-benar dimanfaatkan oleh Pemkot Jogja untuk menjalankan program-program berdasarkan visi misi dan RPJMD dengan tetap memprioritaskan penganggaran penanggulangan Covid-19," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko kemarin (24/9). Catatan dan rekomendasi itu disampaikan badan anggaran sesaat sebelum dewan dan wali kota menandatangani persetujuan bersama terhadap

Perubahan APBD TA 2021 Kota Jogja. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jogja pada Senin (13/9) lalu.

Danang yang juga menjabat ketua DPRD Kota Jogja didampingi dua wakil ketua dewan M. Furzan dan Dhan Novitasari menandatangani persetujuan bersama dengan Wakil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.

Pembahasan perubahan APBD TA 2021 dilakukan selama hampir sebulan. ▶ Baca Oktober... Hal 2



SESUAI JADWAL: Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko dalam sebuah kesempatan.

Oktober, Vaksinasi 100 Persen Warga Kota Jogja Harus Tuntas

Sambungan dari hal 1

Dimulai dengan pengantar wali kota pada Senin (23/8). Dilanjutkan dengan pemangangan umum fraksi-fraksi dua hari kemudian. Wali kota memberikan jawaban pada Jumat (27/8). Dewan kemudian mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPDU) dengan mengundang masyarakat. Sejalan dengan itu badan anggaran beberapa kali mengadakan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun rapat internal.

Dasar pembahasan perubahan APBD TA 2021 itu mengacu pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan anggaran dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan.

Di antaranya, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu harus digunakan pada tahun berjalan.

Ditambah keadaan darurat atau luar biasa. Badan anggaran merekomendasikan Pemkot Jogja segera menuntaskan program vaksinasi Covid-19. "Target 100 persen warga Kota Jogja telah tervaksin pada Oktober 2021 sehingga tercapai *herd immunity* (kekebalan komunal) di Kota Jogja," pinta Danang.

Pemkot Jogja diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jogja untuk penanggulangan kasus Covid-19 sesuai kewenangan masing-masing. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan

dengan merealisasikan belanja bantuan sosial atau bantuan dalam bentuk apapun. Khususnya kepada warga yang terdampak Covid-19 dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Namun jangan sampai menyulitkan warga yang memang berhak menerima bantuan," kata Danang.

Diingatkan, peningkatan infrastruktur agar menjadi perhatian. Ketua dewan mengingatkan jangan sampai saat pandemi ini terjadi ketidakseimbangan antara penanganan dampak kesejahteraan sosial dengan pembangunan infrastruktur wilayah.

"Prioritas pembangunan infrastruktur agar lebih menitikberatkan pada pemenuhan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap wakil rakyat yang tinggal di Umbulharjo ini.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada perubahan sistem pembelajaran bagi siswa di setiap jenjang pendidikan. Menyikapi itu, perlu persiapan sarana dan prasarana yang matang dalam proses pembelajaran secara daring.

Tujuannya agar predikat kota pendidikan tetap dapat dipertahankan. "Meski dalam keterbatasan kondisi dan sistem pembelajaran," ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja ini.

Penggunaan Silpa TA 2021 untuk pengalokasian belanja tidak terduga (BIT) pada Perubahan APBD TA 2021 perlu pencermatan dan tetap mengutamakan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan anggaran juga menyoroti penyertaan modal kepada Bank BPD DIY dan Bank Jogja sebagai bentuk komitmen Pemkot Jogja. Penyertaan modal itu agar dapat dioptimalkan guna menggiatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Jogja. (*kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005